

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN

2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani Km.4.5 Paringin Selatan

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis 2021-2026	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.2 Analisis Kinerja.....	16
3.3 Realisasi Anggaran	35
3.4 Analisis Efisiensi	39
Bab IV Penutup	40

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Januari 2024

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah**



FAKHRIYANTO, S.PT, MP
NIP. 19780601 200501 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati diatas, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 diantaranya:

1. Perumusan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pelaksanaan administrasi Badan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja rata-rata sudah tercapai dan terpenuhi semuanya.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Untuk dapat menyelenggarakan good governance tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 telah berjalan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dalam setiap periode tahunan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan badan secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian akhir dari sistem AKIP. LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders.

Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Uraikan aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi bupati yang meliputi satu / beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir (*ultimate outcome*) yang ingin diwujudkan pada akhir masa jabatan Kepala Badan. Penentuan sebuah visi organisasi adalah pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh

organisasi secara realistis, mempunyai daya tarik dan dapat menjadi pemandu untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan visinya untuk tahun 2016 - 2021 yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu langkah-langkah konkret pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, maka langkah awal yang perlu didukung oleh masing-masing unit organisasi untuk menetapkan visi masing-masing. Untuk itu, visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang akuntabel melalui pelayanan yang profesional”.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang layanan pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran, dan pengelolaan barang milik daerah ;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang layanan pendataan dan penetapan ;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan dan pelaporan ;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pertanggungjawaban :
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran :
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah :
- h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

layanan pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran, dan pengelolaan barang milik daerah :

- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang layanan pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran, dan pengelolaan barang milik daerah :
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021, Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

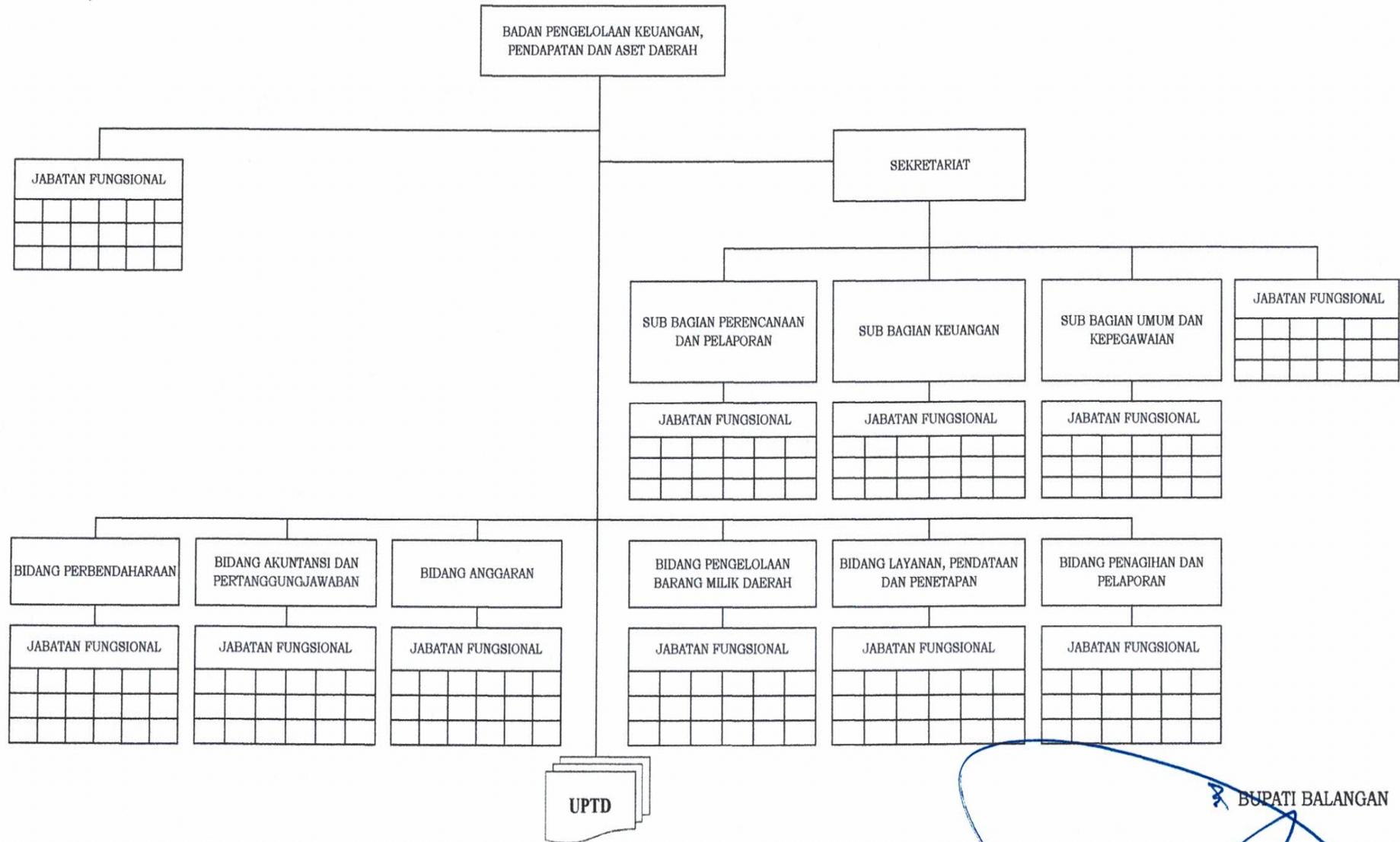
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 2. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
-

- c. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, terdiri dari :
 - 1. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 2. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 2. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- e. Bidang Penagihan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 2. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- f. Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 2. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3. JF Analis Kebijakan Ahli Muda

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKPAD Kab.Balangan sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2023 adalah sebanyak 57 orang PNS yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0
3	SMA	0	2	3	0	5
4	D - 1	0	0	0	0	0
5	D - 2	0	0	1	0	1
6	D - 3	0	0	2	0	2
7	D - 4 / S - 1	0	0	2	0	2
8	S - 1	0	0	30	3	33
9	S - 2	0	0	11	3	14
10	S - 3	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2	49	6	57

Tabel Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Dalam Rencana Strategis 2021 - 2026 disebutkan, Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026 adalah :

“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2021-2026) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu pada Misi IV :

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Selanjutnya, dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2023, yaitu

“Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Berkualitas”

“Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 4 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada akhir periode perencanaan (tahun 2026).

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Program sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	28.865.630.842
<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	322.987.754.375
<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	3.656.389.400
<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	4.011.163.200
Jumlah	359.520.937.817

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

IKU SKPD SEBELUM PERUBAHAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Hasil LHE LAKIP dari Inspektorat
2	Terwujudnya pemerintahan baik	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban	Hasil Opini BPK RI
		IPM Penatausahaan Keuangan	Bidang Perbendaharaan	Laporan Hasil Kuisisioner
		Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	Bidang Anggaran	Perda APBD
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan dengan Bidang Penagihan dan Keberatan	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan		
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Laporan Aset Daerah Kabupaten Balangan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BALANGAN**

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	<p><i>Makna Indikator :</i></p> <p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas (LKPD) yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Ketentuan Perundangan Lainnya.</p> <p><i>Alasan Pemilihan :</i></p> <p>Tercapainya opini WTP menunjukkan kemauan keras dari pimpinan bahwa mereka serius melakukan tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi target Reformasi Birokrasi. Selain itu dengan opini WTP bisa mencerminkan keterbukaan informasi penyelenggara pemerintahan dan dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan dana yang dikelolanya.</p> <p><i>Formulasi Perhitungan :</i></p>	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban	BPK RI

			Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Balangan <i>Sumber/Referensi Indikator :</i> BPK RI		
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	<i>Makna Indikator :</i> Penilaian tingkat kualitas dan kinerja Pemda dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan <i>Alasan Pemilihan :</i> Pedoman bagi Pemda untuk menilai tingkat perbaikan pengelolaan BMD <i>Formulasi Perhitungan :</i> Penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis <i>Sumber/Referensi Indikator :</i> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI	Bidang Pengelolaan BMD	LHP BPK, Pemanfaatan BMD, RKBMD, Pelaporan BMD
3.	Sasaran Strategis : Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan pendapatan	<i>Makna Indikator :</i> Tercapainya kemandirian daerah optimalisasinya sektor pendapatan dari semua aspek jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. <i>Alasan Pemilihan :</i> Pendapatan merupakan bagian sektor pendukung keuangan daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah, diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan; dan Bidang Penagihan dan Pelaporan	Melalui persentase penerimaan pajak daerah

Formulasi Perhitungan :

Formulasi perhitungan pendapatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku

Sumber/Referensi Indikator :

Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	-
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	-
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan	100%	100%	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2021 – 2026. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Kinerja
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan :

Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Berkualitas

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	WTP	-	-	-
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pendapatan daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian				100%	Sangat Tinggi

SASARAN I

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPK	WTP	WTP	-	-	100%

Berdasarkan tabel diatas untuk realisasi belum bisa dicantumkan dikarenakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baru disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan penyampaian LKPD Tahun 2023 yang telah diperiksa BPK RI diserahkan ke DPRD dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat LKPD baru akan diperoleh pada bulan Juni 2023.

Berikut ini Daftar SKPD yang sudah mengumpulkan Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2022 :



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526-2028360
 Paringin 71462

**TANDA TERIMA
 LAPORAN KEUANGAN SKPD**

NO	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL PENYAMPAIAN
11.	BPBD	YUDHI SABARA 198206152008011021	BENDAHARA	11.	27/2 23
12.	SATPOL PP	MISBAH	STAF	12.	
13.	Kec. Arutan	Subhan	Bendahara	13.	17/3 23
14.	DPMPPTTK	M. Rusdi	Kasubbag Keuangan	14.	
15.	Dinas Koperasi UTM Perindustrian & Perdagangan		- " -	15.	
16.	BKPPAD	Triana, S.Kom	- " -	16.	
17.	DISDUKCAPIL	Ariyani	STAF	17.	
18.	DISTHR	Alchmad	Bendahara	18.	2
19.	Setwan	Dayat		19.	
20.	Kec. Jai	Huzaimah 19880212 201001 2 016	Kasubbag Renker	20.	

Balangan, Februari 2023

Mengetahui,
 Kabid. Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Penerima Berkas,

tttd.

Norwanto, SE

Farida Aulia Sari, SE, M. Soc



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526-2028360
Paringin 71462

**TANDA TERIMA
LAPORAN KEUANGAN SKPD**

NO	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL PENYAMPAIAN
1. ✓	Kecamatan Batumondi	Dhevy Lies Indrawati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1.	8-2-2023
2.	DISDIBUD	BARAKATULLAH	KASUBAG KEUANGAN	2.	8-2-2023
3. ✓	Kecamatan Paringin Selatan	Amiliana Sari	staf	3.	16-2-2023
4. ✓	Kecamatan Halong	Heri Suharmani	Kasubag. Rankeu.	4.	15-2-2023
5. ✓	DISPERAPER	Habibah	staf	5.	16-2-2023
6. ✓	DINSOS, PZA, AMD	FAHRIZAL ASDY	BENDAHARA KEUANGAN	6.	16-2-2023
7. ✓	Bappeda Utangan	RIZKY ARIANDI	STAF	7.	20-2-2023
8. ✓	Sri Junda / Kec. Paringin	Sri Junda	Bendahara Pengeluaran	8.	
9. ✓	Abdullah / Kec. Lampirang	Abdullah	Bend Pengeluaran	9.	3-3-2023
10. ✓	Inspektorat	Shauan Lita	STAF	10.	

Mengetahui,
Kabid. Akuntansi dan Pertanggungjawaban

tttd

Norwanto, SE
NIP. 19821020 200904 1 002

Balangan, Februari 2023

Penerima Berkas,

Farida Aulia Sari, SE., M. Sos
NIP. 19880229 201001 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526-2028360
Paringin 71462

TANDA TERIMA
LAPORAN KEUANGAN SKPD

NO	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL PENYAMPAIAN
21.	DISKOMINFO	Indari Mutiani	staf	21.	29/2/2023
22.	Setda	Ana Rahmiday	Benda	22.	6/4-2023
23.	kesbangpol	M. Piski Abdillah	staf	23.	8/4-2023
24.	Dinas PU Perkims		staf	24.	
25.	Lankesppk	Nafarin	staf	25.	11/4 2023
26.	Dinas P&LH	Nana Fitriani	staf	26.	11/4/2023
27.	BKPSDM	Firmansyah	staf	27.	18/4 2023
28.	DKPPP	Khairudin	-	28.	18/4 2023
29.	kec. Tebing Tinggi	M. Mulehar	staf	29.	
30.				30.	

Balangan, Februari 2023

Mengetahui,
Kabid. Akuntansi dan Pertanggungjawaban

tt.d.

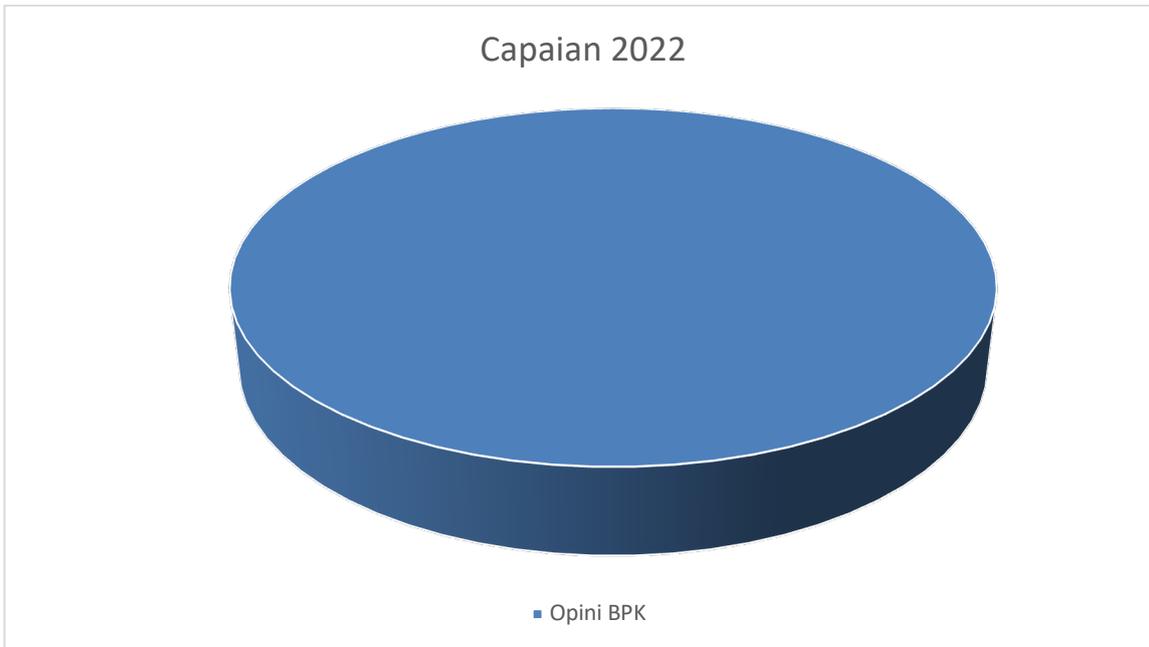
Norwanto, SE
NIP. 19821020 200904 1 002

Penerima Berkas,

Farida Aulia Sari, SE., M. Sos
NIP. 19880229 201001 2 011

CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

SASARAN PERTAMA	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPK	WTP	WTP	-	-	-



Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama ***Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*** adalah:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

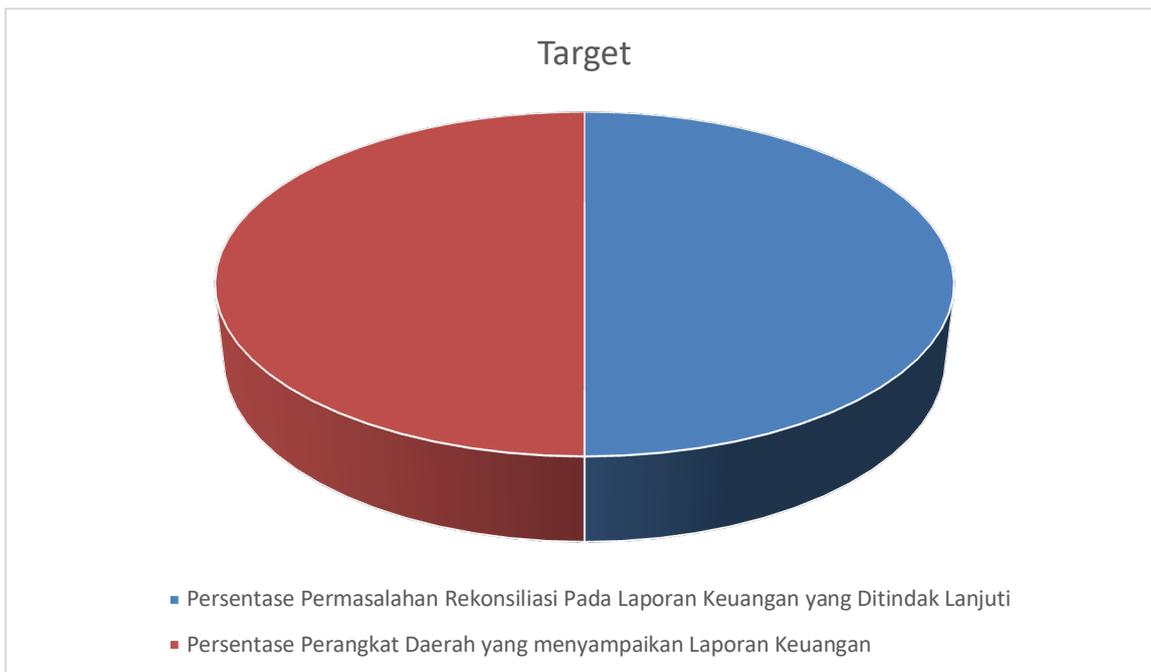
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Capaian indikator Opini BPK di dukung oleh capaian kinerja Jabatan Fungsional yaitu Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1 Persentase Permasalahan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- a. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)
- b. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
- c. Efektivitas sistem pengendalian internal.
- d. Pada tahun 2022, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan

Tahun 2022 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini ini adalah yang ke-10 (sepuluh) kali secara berturut turut dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) :

1. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dengan adanya rekonsiliasi baik itu di internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban untuk komponen belanja dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk komponen Aset serta Bidang Penagihan dan Pelaporan untuk komponen pendapatan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sesungguhnya
3. Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat pada peraturan administrasi perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat dieliminasi.
4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik.
5. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Faktor hambatan utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

- a. Faktor pertama belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya.

- b. Faktor kedua adalah masih kurangnya tenaga dibidang keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai.
- c. Faktor ketiga adalah kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan, hal ini tergambar Sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal.

Dalam mempertahankan capaian dan solusi dalam mengatasi hambatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terus-menerus melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan, dan sebagainya), juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
3. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI seperti Aplikasi FMIS, SIPD-RI, Modul Aset, Sipanda BMD Kab. Balangan, Sicaper (Sistem Pencatatan Persediaan),Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online
4. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah)
5. Menyusun kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Adapun dalam hal Indeks Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Balangan dengan sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bahwa target yang ditetapkan adalah **Predikat Baik**.

Beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat kinerja pengelolaan BMD yang mengacu pada penilaian sasaran strategis antara lain :

1. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, dengan nilai indek 0,53 yang terdiri dari 2 parameter :

a. hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dengan bobot nilai 0,13 dengan mengacu pada 2 sub parameter

➤ Materialitas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD terkait BMD, dengan perhitungan sebagai berikut :

Sub Parameter	Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1..(1)	Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1...(2)	%	FPK	Bobot SP.1.1.1.2 (70%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = \frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = (4) \times (5)$	(8)	(9)	$(10) = (6) \times (8)$
SP.1.1.1.2	473,901,348,629	4,178,520,513,422.64	11.3%	90%	70%	10.2%	1	Buruk	0.7

➤ Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD terkait BMD, dengan perhitungan sebagai berikut :

Subparameter	Jumlah Temuan BPK LKPD terkait BMD di Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1..(1)	Jumlah Temuan t-1 BPK atas LKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1..(2)	%	FPK	Bobot SP.1.1.2.2 (30%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = \frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = \frac{(4)}{(5)} \times (6)$	(8)	(9)	$(10) = (6) \times (8)$
SP.1.1.2.2	11	41	27%	90%	30%	24%	2	Cukup	0.60

- b. Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD yaitu menghitung jumlah realisasi penerimaan dengan target pemanfaatan BMD (* 10 %) sehingga mendapatkan bobot nilai 0,40

Parameter	realisasi penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1....(1)	Target penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota t-1....(1)	%	Bobot NP.1.2.2 (100%)	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
					Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(3) x 100%	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)x(6)
NP.1.2.2	266,245,166	266,245,166	100%	100%	4	Sangat Baik	4.00

2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan perundang-undangan, dengan nilai indeks 0,95 yang terdiri dari 3 parameter :

- a. Ketepatan waktu penyampaian RKBMD dengan bobot nilai 0,20

Parameter	Tanggal Agenda Penyampaian t-1	Bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka		Indeks
			Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)x(4)
NP.2.3.2	27-Jun-22	5%	4	Sangat baik	0.20

- b. Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian BMD dengan bobot nilai 0,05

Sub Parameter	Tanggal Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Bobot	Nilai Kategori Indeks		Indeks
			Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)
NP.2.5.2		5%	1	Buruk	0.05

- c. Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dengan bobot nilai 0,7 yang mengacu pada 2 sub parameter

Sub Parameter	Tanggal Penyampaian Laporan Semester I	Nilai Kategori Indeks		
		Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)	
SP.2.4.2.2		4	Sangat Baik	100.00

- Laporan Semester I Penatausahaan BMD dengan bobot nilai 4

- Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (Akhir Tahun) dengan bobot nilai 3

Sub Parameter	Tanggal Penyampaian Laporan Semester II (akhir Tahun Penatausahaan BMD)	Nilai Kategori Indeks		
		Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)	
SP.2.4.3.2		3	Baik	86.67

3. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif, dengan nilai indek 0,97 yang terdiri dari 2 parameter :

- a. Persentase tindak lanjut temuan BPK terkait Pengelolaan BMD dengan bobot nilai 0,45

Sub Parameter	Jumlah temuan BPK atas LKPD terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota(1)	Jumlah temuan BPK atas LKPD terkait BMD sampai dengan t-1 (Saldo akumulasi jumlah temuan) pada Provinsi atau Kabupaten/Kota.....(2)	%	Bobot NP.3.6.2 (15%)	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
					Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = \frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	(5)	(6)	(7)	$(8) = (5) \times (6)$
NP.3.6.2	8	11	73%	15%	3	Baik	0.45

- b. Tindaklanjut pengelolaan BMD yaitu tindak lanjut atas pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan bobot nilai 0,52 yang terdiri dari 2 sub parameter :

➤ Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan Penghapusan dengan bobot nilai 0.90

Sub Parameter	Jumlah Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan yang telah ditindaklanjuti Periode semester II t-1 s/d semester II t-0 pada Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah total Persetujuan atas Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan yang telah ditindaklanjuti Periode semester II t-1 s/d semester II t-0 pada Provinsi, Kabupaten/Kota	%	PK	Bobot SP.3.7.1.2 (30%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = (2)/(3) \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = (4) \times (5)$	(8)	(9)	$(10) = (6) \times (8)$
SP.3.7.1.2	147	147	100%	80%	30%	80 %	3	Baik	0.90

➤ Tindak lanjut BMD Rusak Berat dengan bobot nilai 0.80

Sub Parameter	Nilai Perolehan BMD Kondisi rusak yang telah selesai ditindaklanjuti t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota	Total Nilai Perolehan BMD Barang Kondisi rusak barang sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota	%	PK	Bobot SP.3.7.2.2 (40%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = (2)/(3) \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = (4) \times (5)$	(8)	(9)	$(10) = (7) \times (8)$
SP.3.7.2.2	50,939,664,561	84,412,936,230	60%	80%	40%	48%	2	Cukup	0.80

➤ Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan bobot nilai 0.90

Sub Parameter	Nilai Perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota	Total nilai perolehan KDP sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota	%	PK	Bobot SP.3.7.3.2 (30%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = (2)/(3) \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = (4) \times (5)$	(8)	(9)	$(10) = (7) \times (8)$
SP.3.7.3.2	40,419,108,290	45,708,451,038	88%	80%	30%	71%	3	Baik	0.90

3. Pelaksanaan administrasi BMD yang handal dengan nilai indeks 0,15 dengan parameter :

a. Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan bobot nilai 0,15

Sub Parameter	Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada Provinsi atau Kabupaten/Kota ... (1)	%	PK	Bobot NP.4.8.2 (100%)	Indeks sebelum bobot	Nilai Kategori Indeks sebelum bobot pada angka (7)		Indeks
							Nilai	Uraian	
(1)	(2)	(3)	$(4) = \frac{(2)}{(3)} \times 100\%$	(5)	(6)	$(7) = \frac{(4)}{(5)}$	(8)	(9)	$(10) = (7) \times (8)$
NP.4.8.2	172	2,258	8%	100%	15%	8%	1	buruk	0.15

Berdasarkan kertas kerja pengukuran atau penilaian sebagaimana yang terdapat pada uraian diatas dengan memperhitungkan akumulasi dari nilai capaian dari sasaran strategis beserta parameter dan sub parameter pendukungnya maka diperoleh hasil bahwa Indeks Pengelolaan Asset (IPA) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebesar 2,60 dengan hasil konversi nilai dengan predikat “**Baik**”.

Tabel konversi penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD

Nilai Indeks	Predikat
$3 < n \leq 4$	Sangat Baik
$2 < n \leq 3$	Baik
$1 < n \leq 2$	Cukup
$n \leq 1$	Buruk

SASARAN II

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

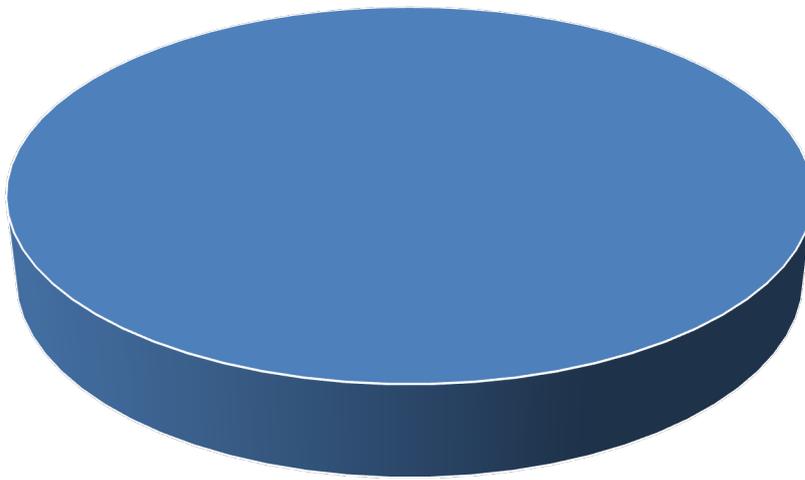
Capaian pengukuran atau penilaian terhadap pengelolaan BMD Kabupaten Balangan tahun 2022 berada di nilai 2,2 dari target yang berada di angka 2,55 yang secara konversi predikat telah berada pada posisi **Baik**.

Tahun 2023 terjadi peningkatan nilai sebesar 0,4 poin sehingga capaian menjadi 2,6 dengan target nilai 2,6. Namun secara konversi predikat masih berada pada posisi **Baik**

**CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

SASARAN KEDUA	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Capaian 2022



■ Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran kedua ***Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD*** adalah:

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian indikator Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah didukung oleh capaian kinerja Jabatan Fungsional yaitu Analis Kebijakan dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
5. Pengamanan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Pengamanan BMD	1 Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan, Administratif dan Fisik BMD	100 Register	100 Register	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	2 Jumlah Aset BMD yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar BMD	800 Objek	800 Objek	100%
3	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan	3 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan BMD pada SKPD	30 SKPD	30 SKPD	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Dilaksanakannya secara berkala koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pengamanan administratif, fisik dan hukum barang milik daerah
4. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

2. Masih banyaknya BMD khususnya bidang tanah yang belum memiliki alas hak sesuai ketentuan
3. Masih terdapat BMD yang tercatat sebagai aset namun secara fisiknya tidak ditemukan maupun sebaliknya ada BMD yang secara fisik ada namun tidak terdaftar pada Daftar Barang Milik Daerah, umumnya aset perolehan tahun lama.

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Melaksanakan dengan sepenuhnya apa yang termuat pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, membentuk Tim Percepatan Sertifikasi tanah milik daerah, meningkatkan koordinasi dengan semua Pengguna Barang/SKPD untuk memastikan lokasi aset bidang tanah maupun dokumen pendukungnya agar seluruh bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemda terdaftar pada BPN dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai (SHP).
2. Mendorong Pengguna Barang/SKPD melakukan penatausahaan BMD khususnya pada area pembukuan/pencatatan atas perolehan aset agar melengkapi semua isian informasi BMD dan memberikan penanda yang jelas pada BMD sesuai SOP yang ada.

- Melakukan pencatatan atas BMD yang belum tercatat dan melakukan penelusuran kembali terhadap aset yang belum ditemukan.

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Inventarisasi BMD	1 Tersusunnya Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	8 Laporan	8 Laporan	100%
2	Terlaksananya Penyusunan LBMD	2 Tersusunnya Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan	3 Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Pengelolaan BMD Aset dan Persediaan dengan SKPD	120 Berita Acara	120 Berita Acara	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Dilaksanakannya rekonsiliasi penatausahaan BMD antara Bidang Pengelolaan BMD dengan Pengurus Barang Pengguna setiap triwulan, Bidang Pengelolaan BMD dengan Bidang Akuntansi setiap semester di tahun berjalan
4. Memberikan pelatihan/bimbingan teknis serta pendampingan dalam kegiatan penatausahaan BMD yang meliputi pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMD berbasis aplikasi
5. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

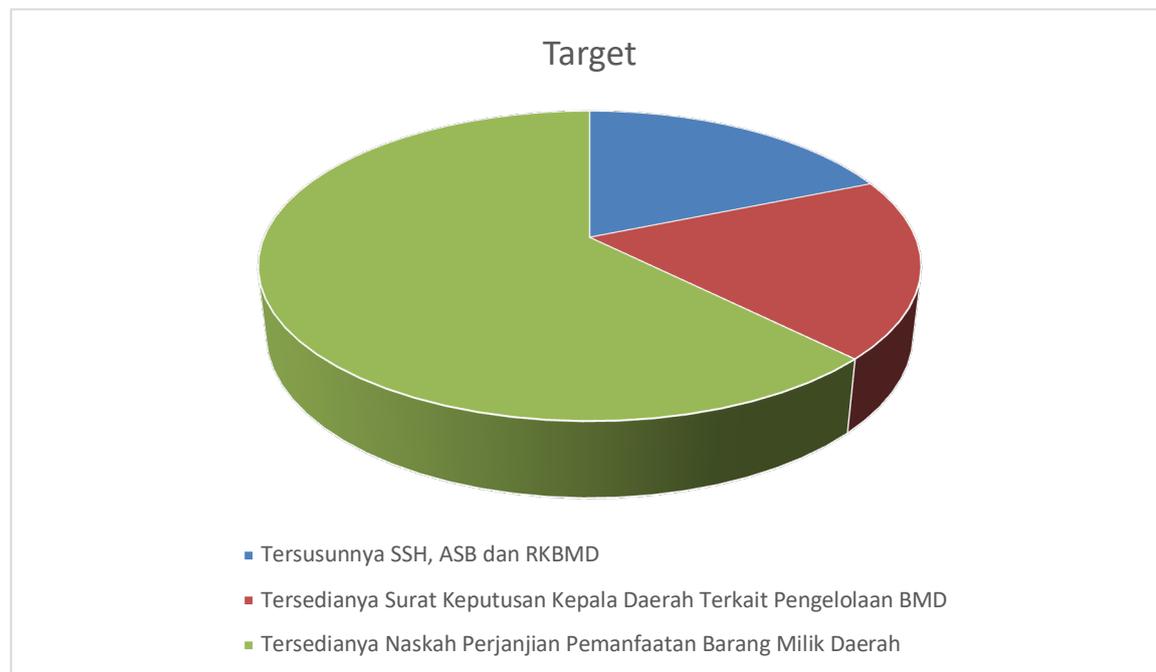
1. Pada SKPD masih terdapat terbatasnya akses Pengurus Barang maupun Pembantu Pengurus Barang dalam memperoleh salinan dokumen pertanggungjawaban dalam rangka kegiatan penatausahaan dan pelaporan BMD
2. Masih terdapat Pengurus Barang Pengguna yang juga merangkap tugas lainnya

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Melakukan koordinasi dengan fungsi perbendaharaan dilanjutkan membuat Surat Edaran dari Pengelola Barang tentang SOP pada tahap proses pembayaran pengadaan barang/jasa agar PPTK menyampaikan salinan/copy pertanggungjawaban kepada Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang
2. Memberikan masukan kepada Pengguna Barang/Kepala SKPD agar Pengurus Barang Pengguna tidak merangkap tugas lain serta memberikan motivasi dan atau dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Penyusunan Standard Harga, Penyusunan RKBMD	1 Tersusunnya SSH, ASB dan RKBMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan	2 Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan BMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Pemamfaatan Barang Milik Daerah	3 Tersedianya Naskah Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100%



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Membuat kerjasama dengan pihak ketiga (LPPM ULM Banjarmasin) dalam penyusunan SSH dan ASB

4. Pengembangan aplikasi Sipanda BMD dalam rangka mendukung penyusunan RKBMD berbasis aplikasi dan dilengkapi dengan pemberian pelatihan/bimbingan teknis serta pendampingan input data RKBMD masing-masing SKPD
5. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

1. Keterlambatan penyampaian usulan harga satuan dari SKPD dari batas waktu yang telah ditentukan serta pengajuan usulan tambahan pada saat telah masuk waktu penyusunan rencana kerja dan anggaran
2. Belum selarasnya waktu proses penyusunan RKBMD/RKPBMD dengan proses perencanaan dan penganggaran
3. Belum tersedia standar kebutuhan barang masing-masing SKPD secara detail dan komprehensif

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi atau sejenisnya kepada Pengguna Barang/SKPD serta berkoordinasi intens dengan TAPD Kabupaten terutama dengan fungsi perencanaan dan keuangan pada masing-masing SKPD
2. Membuat standar kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD

SASARAN III

Meningkatnya Jenis Pendapatan

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pendapatan	101%	100%	113,98%	113,98%	113,98%

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator Persentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 113,98%. Dari target yang ingin dicapai di tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 113,98%.

CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG LAYANAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN

SASARAN KETIGA	Meningkatnya Jenis Pendapatan				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pendapatan	101%	100,00%	113,98%	113,98%	113,98%



Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ketiga ***Meningkatnya Jenis Pendapatan*** adalah:

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian indikator Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah didukung oleh capaian kinerja Jabatan Fungsional yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Pengendalian Pajak Daerah	1	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		2	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Tersusunnya Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah	3	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian						100%



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari para pengampu/ dari masing-masing penanggung jawab akan segala sesuatu yang menjadi ranah tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik
- Dari awal perencanaan/penentuan target sudah dilaksanakan dengan matang dan menentukan

Langkah dan apa saja yang harus dilaksanakan guna tercapainya target yang telah ditetapkan

- c. Dilaksanakannya monitoring/reviu secara berkala memantau pencapaian realisasi dari target dimaksud

Permasalahan / Hambatan

- a. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan SKPD terkait, dan pengiriman peserta sesuai kriteria tujuan dari pelaksanaan kegiatan

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

- a. Komitmen dari SKPD terkait untuk bisa support dan komit terhadap goal/ tujuan yang ingin dicapai, sehingga Ketika pelaksanaan kegiatan, peserta yang dikirimkan untuk berhadir adalah yang memiliki kapasitas untuk itu.

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BALANGANTAHUN ANGGARAN 2023**

PER 31 Desember 2023

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN LALU (Rp)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	REALISASI S/D BULAN INI (RP)	%	SELISIH LEBIH/ (SELISIH KURANG)
I	PAD							
	I. PAJAK DAERAH							
1	Pajak Hotel	4.1.01.06.01.0001	13.500.000,00	10.034.090,00	921.363,00	10.955.453,00	81,15	(2.544.547,00)
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.1.01.07.02.0001	200.000.000,00	267.578.950,00	29.216.499,00	296.795.449,00	148,40	96.795.449,00
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.1.01.07.07.0001	4.500.000.000,00	4.142.677.894,00	662.676.679,00	4.805.354.573,00	106,79	305.354.573,00
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.1.01.08.02.0001	1.000.000,00	-	-	-	-	(1.000.000,00)
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.1.01.08.09.0001	3.000.000,00	725.000,00	60.000,00	785.000,00	26,17	(2.215.000,00)
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.1.01.09.01.0001	75.000.000,00	73.542.878,00	16.890.375,00	90.433.253,00	120,58	15.433.253,00
7	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.1.01.10.01.0001	3.750.000.000,00	4.321.159.115,00	417.703.064,00	4.738.862.179,00	126,37	988.862.179,00
8	Pajak Parkir	4.1.01.11.01.0001	20.500.000,00	11.815.400,00	985.600,00	12.801.000,00	62,44	(7.699.000,00)
9	Pajak Air Tanah	4.1.01.12.01.0001	6.000.000,00	2.572.200,00	246.400,00	2.818.600,00	46,98	(3.181.400,00)
10	Pajak Sarang Burung Walet	4.1.01.13.01.0001	25.000.000,00	1.764.000,00	-	1.764.000,00	7,06	(23.236.000,00)
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.1.01.14.37.0001	1.700.000.000,00	945.184.056,00	414.269.390,00	1.359.453.446,00	79,97	(340.546.554,00)
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.1.01.15.01.0001	650.000.000,00	487.167.972,00	14.330.442,00	501.498.414,00	77,15	(148.501.586,00)
13	BPHTB Pemindahan Hak	4.1.01.16.01.0001	1.300.000.000,00	1.460.911.800,00	120.394.850,00	1.581.306.650,00	121,64	281.306.650,00
14	BPHTB Pemberian Hak Baru	4.1.01.16.02.0001	200.000.000,00	-	-	-	-	(200.000.000,00)
	JUMLAH I		12.444.000.000,00	11.725.133.355,00	1.677.694.662,00	13.402.828.017,00	107,71	958.828.017,00
	II. RETRIBUSI DAERAH							
15	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.1.02.01.01.0001	220.000.000,00	300.215.000,00	121.591.000,00	421.806.000,00	191,73	201.806.000,00
16	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	4.1.02.01.02.0001	252.960.000,00	212.085.000,00	47.618.000,00	259.703.000,00	102,67	6.743.000,00
17	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.1.02.01.04.0001	70.000.000,00	73.200.000,00	5.200.000,00	78.400.000,00	112,00	8.400.000,00
18	Retribusi Pelataran	4.1.02.01.05.0001	1.500.000,00	1.507.000,00	78.000,00	1.585.000,00	105,67	85.000,00
19	Retribusi Los	4.1.02.01.05.0002	60.250.000,00	57.797.000,00	6.195.000,00	64.506.000,00	107,06	4.256.000,00
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.1.02.01.06.0001	80.000.000,00	62.760.000,00	6.709.000,00	68.955.000,00	86,19	(11.045.000,00)
21	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.1.02.01.11.0001	6.000.000,00	4.668.000,00	2.866.600,00	7.534.600,00	125,58	1.534.600,00
22	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian (Menara Telekomunikasi)	4.1.02.01.13.0001	60.000.000,00	24.923.250,00	93.781.415,00	118.704.665,00	197,84	58.704.665,00
23	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.1.02.02.01.0001	68.558.666,00	62.555.666,00	-	62.555.666,00	91,24	(6.003.000,00)
24	Retribusi Penyewaan Tanah	4.1.02.02.01.0002	6.203.000,00	6.203.000,00	-	6.203.000,00	100,00	-
25	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.1.02.02.01.0003	86.500.000,00	74.025.000,00	9.325.000,00	83.350.000,00	96,36	(3.150.000,00)
26	Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.1.02.02.01.0004	5.000.000,00	4.604.000,00	-	4.604.000,00	92,08	(396.000,00)
27	Retribusi Pemakaian Ruang	4.1.02.02.01.0005	71.797.000,00	80.594.300,00	4.700.000,00	85.294.300,00	118,80	13.497.300,00
28	Retribusi Pemakaian Alat	4.1.02.02.01.0007	37.000.000,00	119.785.000,00	-	119.785.000,00	323,74	82.785.000,00
29	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang Yang Dikontrakkan	4.1.02.02.02.0001	192.050.000,00	178.875.000,00	54.770.000,00	233.645.000,00	121,66	41.595.000,00
30	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	4.1.02.02.04.0002	40.000.000,00	49.250.000,00	3.350.000,00	52.600.000,00	131,50	12.600.000,00
31	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	4.1.02.02.04.0003	3.880.000,00	3.880.000,00	-	3.880.000,00	100,00	-
32	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	4.1.02.02.11.0003	70.000.000,00	48.430.500,00	6.937.500,00	55.368.000,00	79,10	(14.632.000,00)
33	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.1.02.02.11.0004	130.000.000,00	27.955.000,00	5.431.000,00	33.386.000,00	25,68	(96.614.000,00)
34	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.1.02.03.07.0001	700.000.000,00	568.585.800,00	568.300,00	569.154.100,00	81,31	(130.845.900,00)

JUMLAH II		2.161.698.666,00	1.961.898.516,00	369.120.815,00	2.331.019.331,00	107,83	169.320.665,00
III. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							

NO	URAIAN	KODE REKONING	ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN LALU (Rp)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	REALISASI S/D BULAN INI (RP)	%	SELISIH LEBIH/ (SELISIH KURANG)
35	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah(Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.1.03.02.01.0001	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	-	14.874.367.772,00	100,00	-
	JUMLAH III		14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	-	14.874.367.772,00	100,00	-
	IV.LAIN-LAIN PAD YG SAH							
36	Hasil Sewa BMD	4.1.04.03.01.0001	5.000.000,00	-	-	-	-	(5.000.000,00)
37	Jasa Giro Pada Kas Daerah	4.1.04.05.01.0001	6.124.071.526,00	13.378.446.367,61		13.378.446.367,61	218,46	7.254.374.841,61
38	Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	4.1.04.05.02.0001	50.000.000,00	13.210.850,13		13.210.850,13	26,42	(36.789.149,87)
39	Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.1.04.07.01.0001	22.402.283.091,00	14.922.915.553,07	1.739.214.989,00	16.662.130.542,07	74,38	(5.740.152.548,93)
40	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.1.04.11.01.0001	382.673.769,00	382.673.768,86		382.673.768,86	100,00	(0,14)
41	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.1.04.12.07.0002	717.452,00	1.152.989,98	67.948,00	1.220.937,98	170,18	503.485,98
42	Pendapatan Jasa Boga /Katering dan Sejenisnya	4.1.04.12.07.0007	7.831.106,00	26.868.221,20	5.523.497,00	32.391.718,20	413,63	24.560.612,20
43	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.1.04.12.08.0009	1.100,00	21.500,00		21.500,00	1.954,55	20.400,00
44	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.1.04.12.09.0001	86.505,00	86.505,00		86.505,00	100,00	-
45	Pendapatan Denda Pajak Parkir	4.1.04.12.11.0001	145.000,00	154.276,00		154.276,00	106,40	9.276,00
46	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	4.1.04.12.13.0001	-	48.384,00		48.384,00	#DIV/0!	48.384,00
47	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.1.04.12.14.0037	142.985,00	11.631.460,00	4.745.218,00	16.376.678,00	11.453,42	16.233.693,00
48	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	4.1.04.12.15.0001	9.528.780,00	18.787.803,00	613.779,00	19.401.582,00	203,61	9.872.802,00
49	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.1.04.13.01.0002	40.000,00	80.000,00		80.000,00	200,00	40.000,00
50	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	4.1.04.15.01.0001	2.221.782.475,00	2.231.241.375,07		2.231.241.375,07	100,43	9.458.900,07
51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.1.04.15.03.0001	11.451.788,00	18.951.788,00	1.500.000,00	20.451.788,00	178,59	9.000.000,00
52	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4.1.04.15.07.0001	427.630.000,00	740.986.255,00	146.592.800,00	887.579.055,00	207,56	459.949.055,00
53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.1.04.15.34.0001	664.452.696,00	664.488.696,06	3.792.500,00	668.281.196,06	100,58	3.828.500,06
54	Pendapatan BLUD	4.1.04.16.01.0001	35.600.000.000,00	37.590.155.339,90		37.590.155.339,90	105,59	1.990.155.339,90
55	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	4.1.04.18.01.0001	7.133.469.220,00	5.957.941.821,00	690.127.452,00	6.648.069.273,00	93,20	(485.399.947,00)
	JUMLAH IV		75.041.307.493,00	75.959.842.953,88	2.592.178.183,00	78.552.021.136,88	104,68	3.510.713.643,88
	JUMLAH PAD		104.521.373.931,00	104.521.242.596,88	4.638.993.660,00	109.160.236.256,88	104,44	4.638.862.325,88
II	PENDAPATAN TRANSFER							
	I. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		2.177.601.439.712,00	2.445.030.866.631,00	50.269.927.057,00	2.495.300.793.688,00	114,59	317.699.353.976,00
56	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.2.01.01.01.0001	38.031.337.000,00	33.166.488.800,00	3.499.786.700,00	36.666.275.500,00	96,41	(1.365.061.500,00)
57	DBH PPh Pasal 21	4.2.01.01.01.0002	7.742.280.663,00	6.305.005.200,00	-	6.305.005.200,00	81,44	(1.437.275.463,00)
58	DBH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.2.01.01.01.0003	2.959.682.337,00	116.172.600,00	-	116.172.600,00	3,93	(2.843.509.737,00)
59	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.2.01.01.01.0005	535.425.000,00	1.897.486.500,00	-	1.897.486.500,00	354,39	1.362.061.500,00
60	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba - Landrent	4.2.01.01.01.0008	384.112.500,00	544.898.790,00	-	544.898.790,00	141,86	160.786.290,00
61	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba - Royalty	4.2.01.01.01.0009	1.504.099.788.500,00	1.845.904.037.982,00	-	1.845.904.037.982,00	122,72	341.804.249.482,00
62	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.2.01.01.01.0010	401.646.000,00	357.370.650,00	-	357.370.650,00	88,98	(44.275.350,00)
63	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	4.2.01.01.01.0011	148.155.000,00	-	-	-	-	(148.155.000,00)
64	DBH Sawit				5.678.956.000,00	5.678.956.000,00	#DIV/0!	5.678.956.000,00
65	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.2.01.01.01.0013	1.259.941.000,00	1.259.941.000,00	-	1.259.941.000,00	100,00	-
66	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.01.01.02.0001	361.852.722.000,00	345.546.179.087,00	16.275.565.363,00	361.821.744.450,00	99,99	(30.977.550,00)
67	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4.2.01.01.03.0001	957.781.000,00	944.727.580,00	-	944.727.580,00	98,64	(13.053.420,00)
68	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.2.01.01.03.0002	3.621.649.000,00	2.754.604.300,00	558.371.917,00	3.312.976.217,00	91,48	(308.672.783,00)

69	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.2.01.01.03.0003	2.465.161.000,00	1.725.612.700,00	404.820.576,00	2.130.433.276,00	86,42	(334.727.724,00)
70	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	4.2.01.01.03.0016	1.618.450.000,00	1.353.400.000,00	-	1.353.400.000,00	83,62	(265.050.000,00)
71	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.2.01.01.03.0034	17.720.889.000,00	-	-	-	-	(17.720.889.000,00)

NO	URAIAN	KODE REKENING	ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN LALU (Rp)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	REALISASI S/D BULAN INI (RP)	%	SELISIH LEBIH/ (SELISIH KURANG)
72	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.2.01.01.03.0035	-	12.404.622.300,00	2.214.915.900,00	14.619.538.200,00	#DIV/0!	14.619.538.200,00
73	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.2.01.01.03.0037	7.383.053.000,00	5.168.137.100,00	4.743.945.800,00	9.912.082.900,00	134,25	2.529.029.900,00
74	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.2.01.01.03.0040	6.625.866.000,00	4.638.106.200,00	1.987.759.800,00	6.625.866.000,00	100,00	-
75	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	4.2.01.01.03.0055	776.014.000,00	680.698.300,00	-	680.698.300,00	87,72	(95.315.700,00)
76	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	4.2.01.01.03.0059	1.050.030.000,00	-	-	-	-	(1.050.030.000,00)
77	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.2.01.01.03.0060	6.309.335.000,00	5.211.617.235,00	1.249.191.601,00	6.460.808.836,00	102,40	151.473.836,00
78	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.2.01.01.04.0001	13.559.902.712,00	6.423.701.350,00	-	6.423.701.350,00	47,37	(7.136.201.362,00)
79	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.2.01.01.04.0003	895.000.000,00	-	-	-	-	(895.000.000,00)
80	DAK Non Fisik - TPG PNSD	4.2.01.01.04.0004	47.021.000.000,00	36.009.334.000,00	8.117.595.700,00	44.126.929.700,00	93,85	(2.894.070.300,00)
81	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	4.2.01.01.04.0005	1.450.000.000,00	530.000.950,00	1.450.000.000,00	1.980.000.950,00	136,55	530.000.950,00
82	DAK Non Fisik - TKG PNSD	4.2.01.01.04.0006	2.200.000.000,00	-	699.430.000,00	699.430.000,00	31,79	(1.500.570.000,00)
83	DAK Non Fisik - BOP PAUD	4.2.01.01.04.0007	3.963.220.000,00	346.505.000,00	-	346.505.000,00	8,74	(3.616.715.000,00)
84	DAK Non Fisik - BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan	4.2.01.01.04.0008	1.601.800.000,00	178.000.000,00	-	178.000.000,00	11,11	(1.423.800.000,00)
85	DAK Non Fisik -BOKKB-BOK	4.2.01.01.04.0011	13.485.477.000,00	6.483.691.200,00	529.858.200,00	7.013.549.400,00	52,01	(6.471.927.600,00)
86	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	4.2.01.01.04.0020	-	208.700.000,00	-	208.700.000,00	#DIV/0!	208.700.000,00
87	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.2.01.01.04.0021	3.729.566.000,00	3.135.256.107,00	-	3.135.256.107,00	84,06	(594.309.893,00)
88	DID	4.2.01.02.01.0001	10.447.499.000,00	10.447.499.000,00	2.859.729.500,00	13.307.228.500,00	127,37	2.859.729.500,00
89	Dana Desa	4.2.01.05.01.0001	113.304.657.000,00	111.289.072.700,00	-	111.289.072.700,00	98,22	(2.015.584.300,00)
	II. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		95.878.001.752,00	113.011.263.142,80	0,00	113.011.263.142,80	117,87	17.133.261.390,80
90	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0001	5.835.836.516,00	5.416.906.256,79	-	5.416.906.256,79	92,82	(418.930.259,21)
91	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0002	10.111.334.647,00	10.447.542.794,70	-	10.447.542.794,70	103,33	336.208.147,70
92	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.2.02.01.01.0003	69.180.199.228,00	84.911.918.837,23	-	84.911.918.837,23	122,74	15.731.719.609,23
93	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.2.02.01.01.0004	395.455.812,00	1.020.906.976,08	-	1.020.906.976,08	258,16	625.451.164,08
94	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.2.02.01.01.0005	10.355.175.549,00	11.213.988.278,00	-	11.213.988.278,00	108,29	858.812.729,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN		2.273.479.441.464,00	2.558.042.129.773,80	50.269.927.057,00	2.608.312.056.830,80	114,73	334.832.615.366,80
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
	I. PENDAPATAN HIBAH		6.176.710.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.176.710.373,00
95	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (Lumpsum Payment)	4.3.01.05.01.0001	6.176.710.373,00	-	-	-	-	(6.176.710.373,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		6.176.710.373,00	-	-	-	-	-6.176.710.373,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.384.177.525.768,00	2.662.563.372.370,68	54.908.920.717,00	2.717.472.293.087,68	113,98	333.294.767.319,68

Berdasarkan tabel (Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kab. Balangan TA. 2023) terbaca bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 melebihi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Target awal adalah sebesar Rp. 2.384.177.525.768 dan realisasi sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.717.472.293.087,68 (113,98%).

Dari PAD yang berasal dari sector Pajak Daerah target Rp. 12.444.000.000 terealisasi sebesar Rp. 13.402.828.017 (107,71%). Begitupun untuk pendapatan yang berasal dari retribusi daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Target nya sebesar Rp. 2.161.698.666 sedangkan realisasi Rp. 2.331.019.331 atau sebesar 107,83 %.

Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 100% dimana target sama dengan realisasi sebesar Rp. 14.874.367.772 yang berupa penyertaan modal pada BUMD.

Pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 75.041.307.493 dan terealisasi sebesar Rp. 78.552.021.136,88 (104,68%) artinya pada sektor ini pun pencapaian/ terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun untuk pendapatan transfer, baik transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah juga mengalami peningkatan/pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun target awal sebesar Rp. 2.273.479.441.464 dan terealisasi sebesar Rp. 2.608.312.056.830,80 (114,73%). Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah (berupa sumbangan pihak ketiga/sejenis (Lumpsum Payment)) tidak terealisasi dari target Rp. 6.176.710.373, sehingga jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.717.472.293.087,68 sedangkan target sebesar Rp. 2.384.177.525.768 jika dipersentase menjadi 113,98% melampaui target sebesar 13,98%. Dari tabel tersebut dapat terlihat, ada beberapa variable dari PAD yang tidak tercapai targetnya seperti pada pajak burung wallet, capaian hanya sebesar 7,06% berarti sektor ini perlu dikaji ulang, apakah target terlalu tinggi atau ada penyebab lainnya.

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
YANG DITINDAKLANJUTI PADA TAHUN 2023**

REKOMENDASI		TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja	
1	Untuk menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis perencanaan kinerja	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja pada Tahun 2023
2	Dalam menampilkan bukti tanggal upload dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu	Pada Tahun 2023 bukti upload dokumen perencanaan kinerja akan dipublikasikan tepat waktu
3	Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)	Telah dilakukan penyusunan IKU pada Tahun 2023
B	Pengukuran Kinerja	
4	Untuk menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja/Penilaian SKPD	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP Pengukuran Kinerja pada Tahun 2023
5	Untuk menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis pengukuran kinerja	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP Pengukuran Kinerja pada Tahun 2023
6	Saat Monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD	Terdapat daftar hadir saat melakukan monitoring dan evaluasi
7	Membuat dokumen sumber data pengukuran kinerja yang akuntabel dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai	Telah disusun dokumen pengukuran kinerja yang akuntabel dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
8	Membuat dokumen sumber data pengukuran kinerja sebagai bahan membuat formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Telah disusun dokumen pengukuran kinerja untuk membuat formulasi perhitungan IKU
9	Melampirkan jadwal kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan	Telah dilampirkan jadwal pengukuran kinerja setiap triwulan
10	Monev Triwulan 1,2,3, dan 4 ditandatangani setiap pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui Pimpinan SKPD	Monev Triwulan 1,2,3, dan 4 telah ditandatangani oleh Kepala SKPD

11	Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	
12	Setiap pegawai memberikan laporan pengukuran kinerja triwulan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap triwulan dan memberikan langkah-langkah perbaikan untuk realisasi yang tidak mencapai target, dan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan perbaikan untuk laporan selanjutnya	Telah disusun pengukuran kinerja setiap pegawai yang dilakukan setiap triwulan
C	Pelaporan Kinerja	
13	Ada bukti unggah pada Website SKPD dan di esr.menpan.go.id bisa menunjukkan lokasi file dan waktu unggah	Terdapat bukti unggah pada esr.menpan.go.id
14	Menyampaikan bukti pengiriman/penyerahan/tanda terima LKjIP di sampaikan tepat waktu	Terdapat bukti pengiriman LKjIP kepada bagian organisasi
15	Dokumen LKjIP menginfokan Realisasi capaian kinerja secara komulatif (tahun awal/pertama RPJMD/Renstra hingga tahun dilakukan evaluasi) dibandingkan juga dengan target akhir/total pada RPJMD dan Renstra	Terdapat realisasi capaian kinerja secara komulatif dibandingkan dengan target Renstra
16	Dokumen LKjIP menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas tahun n-1 dan belum sampai tahun n-2 untuk dilakukan perbandingan kinerja	Terdapat perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan perbandingan kinerja
17	Dokumen LKjIP memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional	Dokumen LKjIP telah memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD/Pemda
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
18	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan	Telah dilakukan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan yang dilaksanakan setiap triwulan
19	Membuat Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Tahun 2023

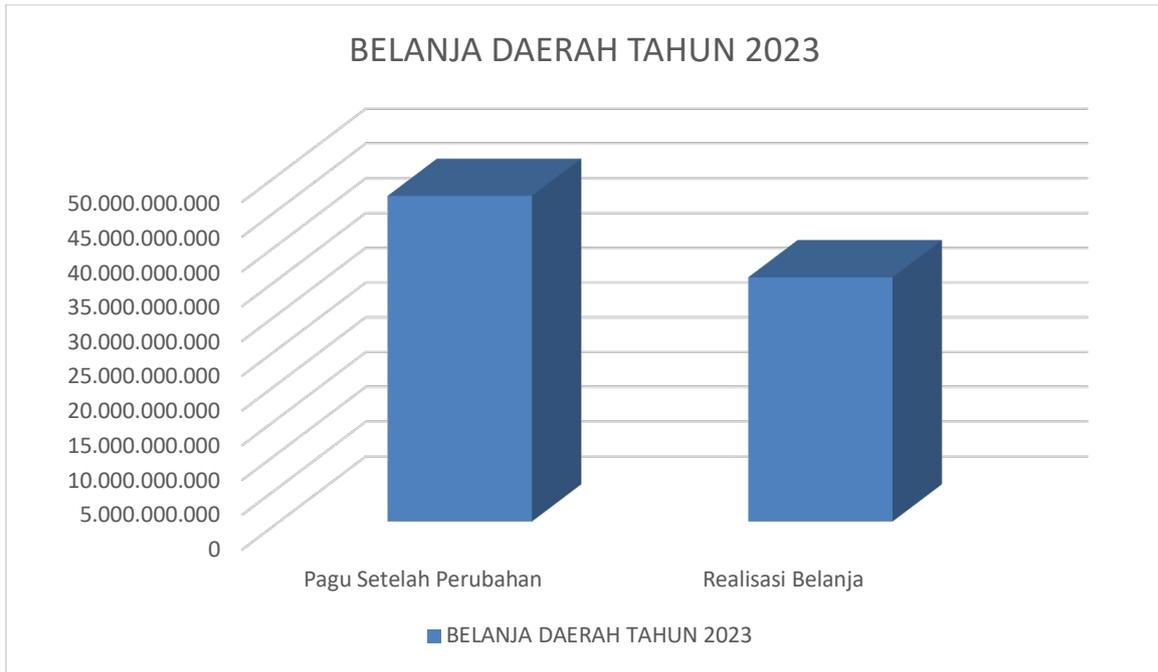
20	Rekomendasi pada LHE SAKIP BPKPAD Tahun 2021 ditindak lanjuti keseluruhan	Untuk Rekomendasi LHE AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 sudah ditindaklanjuti namun pengaplikasiannya belum dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 nantinya akan dituangkan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Tahun 2021 dan Tahun 2022
21	Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD	Setelah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 selesai disusun nantinya akan langsung meminta Inspektorat dalam hal ini APIP untuk melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

C REALISASI ANGGARAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian indikator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja. Adapun Realisasi APBD tahun 2023 sebesar Rp. 35.111.063.193,- atau 74,98% dari pagu sebesar Rp. 46.828.056.242,00



Realisasi Belanja Daerah TA. 2023 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel
Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72 (BB) Nilai	69,95 (BB) Nilai	97,15%	28.865.630.842	20.222.029.541	70,06	8.643.601.301
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	266.957.800	228.186.000	85,48	38.771.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	52.021.800	39.986.800	76,87	12.035.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	134.483.400	130.546.600	97,07	3.936.800
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	80.452.600	57.652.600	71,66	22.800.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	14.436.428.742	10.216.750.499	70,77	4.219.678.243
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/Bulan	696 Orang/Bulan	100%	13.908.897.342	9.820.107.574	70	4.088.789.768

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	146.795.000	130.161.500	88,67	16.633.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	6	Laporan	100%	70.736.700	49.559.800	70,06	21.176.900
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	6	Laporan	100%	309.999.700	216.921.625	69,97	93.078.075
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	1.667.447.400	1.101.258.404	66,04	566.188.996
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	100%	233.648.000	191.170.000	81,82	42.478.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	200	orang	100%	350.799.400	34.616.800	9,87	316.182.600
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320	orang	320	orang	100%	1.083.000.000	875.471.604	80,84	207.528.396
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	4.515.732.700	2.097.036.983	46,44	2.418.695.717
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket	100%	142.989.200	63.936.100	44,71	79.053.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	Paket	100%	2.363.718.500	1.681.630.000	71,14	682.088.500

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	33.213.000	31.766.800	95,65	1.446.200
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Dokumen	90 Dokumen	25%	31.500.000	2.400.000	7,62	29.100.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346 Laporan	346 Laporan	100%	1.944.312.000	317.304.083	16,32	1.627.007.917
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100%	4.990.000.000	4.872.324.200	97,64	117.675.800
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38 Unit	38 Unit	78,95%	4.990.000.000	4.872.324.200	97,64	117.675.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	1.320.063.600	808.643.031	61,26	511.420.569
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	701.968.000	451.422.231	64,31	250.545.769
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	172.921.000	39.015.000	22,56	133.906.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	445.174.600	318.205.800	71,48	126.968.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	1.669.000.600	897.830.424	53,79	771.170.176

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	Unit	20	Unit	100%	999.791.400	416.962.624	41,70	582.828.776
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10	Unit	0	Unit	0%	57.500.000	-	-	57.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	Unit	20	Unit	100%	611.709.200	480.867.800	78,61	130.841.400
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	87	%	78,738	%	90,50%	322.987.754.375	202.901.992.321	62,82	120.085.762.054
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	100	%	100%	2.987.984.900	2.307.977.200	77,24	680.007.700
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	145.743.000	79.341.116	54,44	66.401.884
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	113.810.000	76.589.170	67,30	37.220.830
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30	Dokumen	30	Dokumen	100%	973.853.000	784.993.908	80,61	188.859.092
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30	Dokumen	30	Dokumen	100%	82.321.000	64.974.488	78,93	17.346.512
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	421.780.000	264.952.145	62,82	156.827.855

6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	245.926.000	204.058.219	82,98	41.867.781
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1.004.551.900	833.068.154	82,93	171.483.746
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100%	3.989.670.800	3.464.195.171	86,83	525.475.629
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	696	Orang/Bulan	696	Orang/Bulan	100%	13.908.897.342	254.464.696	67,39	13.654.432.646
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	197.571.400	178.653.308	90,42	18.918.092
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	Dokumen	100	Dokumen	100%	1.262.972.000	1.097.045.434	86,86	165.926.566
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3	Laporan	3	Laporan	100%	429.991.000	337.286.498	78,44	92.704.502
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	466.668.500	457.802.596	98,10	8.865.904

6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	340.101.700	299.130.313	87,95	40.971.387
7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang	100	Orang	100%	914.776.200	839.812.326	91,81	74.963.874
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100%	3.532.745.300	2.906.295.203	82,27	626.450.097
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	768	Dokumen	768	Dokumen	100%	482.367.600	385.095.198	79,83	97.272.402
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Laporan	18	Laporan	100%	157.291.000	98.151.000	62,40	59.140.000
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	608	Laporan	608	Laporan	100%	127.463.100	87.406.393	68,57	40.056.707
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	316.528.300	266.868.700	84,31	49.659.600
5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	444.414.100	364.774.964	82,08	79.639.136

6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	orang	100	orang	100%	2.004.681.200	1.703.998.948	85	300.682.252
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100%	312.477.353.375	194.223.524.747	62,16	118.253.828.628
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6	Laporan	6	Laporan	100%	305.046.166.000	191.363.763.800	62,73	113.682.402.200
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6	Laporan	6	Laporan	100%	5.603.265.908	1.034.500.000	18,46	4.568.765.908
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6	Laporan	6	Laporan	100%	1.827.921.467	1.825.260.947	99,85	2.660.520
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,6	angka	2,6	angka	100%	3.656.389.400	3.291.292.316	90,01	365.097.084
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,6	angka	2,6	angka	100%	3.656.389.400	3.291.292.316	90,01	365.097.084
1	Penyusunan Standar Harga	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	238.774.800	236.640.900	99,11	2.133.900
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60	Dokumen	60	Dokumen	100%	755.971.400	736.913.640	97,48	19.057.760
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	128.336.200	124.227.590	96,80	4.108.610

4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	379.899.100	356.484.498	93,84	23.414.602
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	601.170.500	580.419.365	96,55	20.751.135
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	49.641.500	39.986.710	80,55	9.654.790
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30	Dokumen	30	Dokumen	100%	462.858.200	313.789.092	67,79	149.069.108
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	943.926.000	830.639.821	88	113.286.179
9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90	Orang	90	Orang	100%	95.811.700	72.190.700	75,35	23.621.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100	%	100	%	100%	4.011.163.200	3.118.013.762	77,73	893.149.438
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	%	100	%	100%	4.011.163.200	3.118.013.762	77,73	893.149.438
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	383.337.800	339.356.313	88,53	43.981.487

2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100%	1.043.001.800	663.249.800	63,59	379.752.000
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	619.194.200	543.263.190	87,74	75.931.010
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42000	Objek Pajak	42000	Objek Pajak	100%	328.996.400	267.018.334	81,16	61.978.066
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500	Laporan	3500	Laporan	100%	949.593.000	702.459.014	73,97	247.133.986
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	91.693.600	85.686.500	93,45	6.007.100
7	Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen SSPD	12	Dokumen SSPD	100%	261.714.200	236.820.700	90,49	24.893.500
8	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	12	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	8,33	142.852.800	119.115.850	83,38	23.736.950
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen LHP	12	Dokumen LHP	100%	190.779.400	161.044.061	84,41	29.735.339

D. ANALISIS EFISIENSI

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100%	82,27%	17,73%
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	2,6	90,01%	9,99%
3	Meningkatnya jenis pendapatan	100%	77,73%	22,27%

3.4 ANALISIS EFISIENSI

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Pemerintahan Baik	100%	251.868.435.795	Sangat Efisien
2	Nilai AKIP	70,02%	144.376.300	Sangat Efisien

Tabel Analisis Efisiensi Sasaran

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bahwa 3 (tiga) indikator kinerja utama rata-rata kategori Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan untuk capaian dari ketiga indikator tersebut mencapai 100%.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi upaya pengembangan dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan datang.

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah**



FAKHRIYANTO, S.PT, MP
NIP. 19780601 200501 1 016
